

## PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA RIAU

Asepma Hygi Prihastuti

Dosen STIE Persada Bunda, Email: asepma.hygie@gmail.com

### Abstract

*The high and low Human Development Index (HDI) is influenced by several factors, such as economic growth, infrastructure and government policies. Infrastructure is built by the state through capital expenditure. The purpose of this study is to determine the effect of capital expenditure allocation and economic growth to human development index in Riau district/city 2014-2016. Data processing by path analysis using SPSS version 21. The result of research shows that capital expenditure allocation has direct influence to economic growth in district/city of Riau Province. The allocation of capital expenditure does not have a direct impact on the human development index, while the economic growth directly affects the human development index. And the allocation of capital expenditures indirectly significantly influence the Human Development Index through economic growth.*

*Keywords: allocation of capital expenditure, economic growth, Human Development Index (HDI)*

### Pendahuluan

Suatu negara bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pembangunan dalam bidang perekonomian, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai indikatornya. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor untuk mengukur tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap Negara, yang diukur dengan pendapatan perkapitanya. Sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian serta kualitas manusia.

Kualitas manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*(HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Dalam publikasinya, Badan Pusat Statistik telah merubah beberapa indikator yang sudah tidak tepat lagi untuk digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu (1) Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik, sehingga diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, (2) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Berdasarkan data dari BPS dapat diketahui Indeks Pembangunan Manusia tertinggi tahun 2016 di Indonesia adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 79,60 sedangkan terendah Papua dengan IPM sebesar 58,05 dan rata-rata IPM penduduk Indonesia sebesar 70,18, dimana Riau

memperoleh IPM sebesar 71,20 diatas dari rata-rata IPM penduduk Indonesia (<https://www.bps.go.id/>).

Menurut Fhino dan Priyo (2009), Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada akhirnya ditentukan oleh banyak faktor terutama pertumbuhan ekonomi, infrastuktur dan kebijakan pemerintah. Infrastuktur dibangun oleh negara melalui belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal dapat berupa: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal lainnya, dan (6) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat ini prioritas utama pembangunan nasional masih bertumpu pada pembangunan fisik, mengalahkan bidang pendidikan yang memiliki arti dan bersifat strategis dalam memperbaiki kehidupan negara ini. Untuk itu sudah seharusnya kita menggeser skala prioritas utama pembangunan nasional dengan menempatkan pendidikan sebagai hal yang utama dalam meningkatkan pembangunan manusia. Karena itu, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, melalui upaya meningkatkan mutu pendidikan, merupakan suatu yang mutlak untuk membangun negara ini agar lebih memiliki kompeten di dunia internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji “Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau”.

## **Kajian Pustaka**

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (<https://riau.bps.go.id/>).

Terdapat 3 golongan status pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM yaitu: (1)  $IPM < 50$  dikatakan rendah, (2)  $50 \leq IPM < 80$  dikatakan sedang/menengah, dan (3)  $IPM \geq 80$  dikatakan tinggi.

### **Alokasi Belanja Modal**

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pasal 53).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 belanja modal dipergunakan untuk antara lain: (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (3) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,

(4) belanja modal lainnya, dan (5) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU). Alokasi Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja dalam APBD}} \times 100\%$$

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1996: 33) pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Todaro (2003: 92) dalam Sasana (2009) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

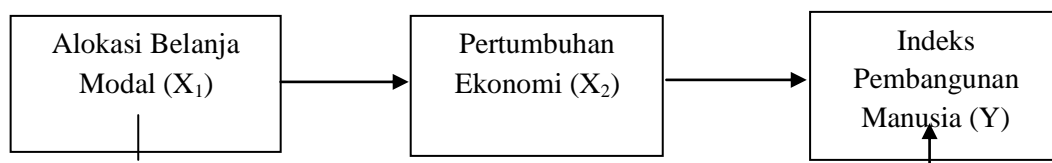
Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut (Sukirno, 2007):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

### Kerangka Pemikiran

Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dapat dilakukan dengan pembangunan dalam bidang perekonomian, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai indikatornya. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor untuk mengukur tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara, yang diukur dengan pendapatan perkapitanya. Kualitas manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*(HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada akhirnya ditentukan oleh banyak faktor terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Infrastruktur dibangun oleh negara melalui belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara skematis model kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Berikut hipotesis berdasarkan model penelitian dalam penelitian ini:

H<sub>1</sub> : Alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.

- H<sub>2</sub> : Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Riau.
- H<sub>3</sub> : Alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Riau.

### Metodologi

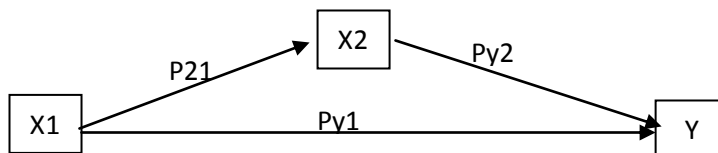
Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan secara sensus atas laporan realisasi APBD 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2014-2016, sehingga diperoleh data berjumlah 36. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data alokasi belanja modal diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan data Pertumbuhan Ekonomi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik.

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang menyajikan dan menganalisis data masing-masing variabel penelitian secara *univariate* dan analisis jalur menggunakan bantuan program SPSS versi 21 melalui 2 struktur dengan persamaan seperti berikut.

$$\text{Struktur 1} \rightarrow X_2 = p_{21}X_1 + R_1$$

$$\text{Struktur 2} \rightarrow Y = p_{y1}X_1 + p_{y2}X_2 + R_2$$

Penelitian ini mengkaji pengaruh alokasi belanja modal ( $X_1$ ), dan pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ) terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ) dengan keterkaitan seperti gambar berikut:



Gambar 2. Keterkaitan antar variable penelitian

### Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis deskriptif untuk masing-masing variabel dan sub variabel penelitian secara ringkas seperti pada tabel berikut

Tabel 1. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
indeks pembangunan manusia	36	62.91	79.69	69.4981	4.08017
alokasi belanja modal	36	13.78	39.94	24.1186	6.77686
pertumbuhan ekonomi	36	2.24	24.62	8.3333	5.36087
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data BPS Yang Diolah

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan kondisi masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut: *Pertama*; Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Pekanbaru sebesar 79,69 dan terendah adalah Kepulauan Meranti sebesar 62,91. *Kedua*; alokasi belanja modal

tertinggi sebesar 39,94% adalah Kabupaten Bengkalis, dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.815.703.950.258 dari total belanja Rp. 4.546.129.971.366 sedangkan nilai terendah sebesar 13,78% pada Kabupaten Dumai, dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 143.885.869.917 dari total belanja Rp. 1.044.124.971.350.79. *Ketiga*; Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tertinggi pada Kabupaten Bengkalis sebesar 24,62% dan terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu sebesar 2,24%.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable bebas dengan variable terikat secara parsial. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 21. Berdasarkan data-data yang berjumlah 36 diperoleh hasil sebagai berikut:

**Hipotesis 1** yang berbunyi: Alokasi belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3. Coefficient Regresi Alokasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.542	2.905		-.531	.599
	ALOKASI BELANJA MODAL	.409	.116	.518	3.527	.001

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data: output SPSS yang diolah, 2018

Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat diketahui koefisien dari hasil analisis regresi untuk variabel alokasi belanja modal sebesar 0,409 dengan konstanta sebesar -1,542 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$X_2 = -1,542 + 0,409X_1$$

Hasil uji empiris pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai p value (Sig) sebesar 0,001 yaitu di bawah alpha 5%. Maka, H<sub>1</sub> diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan antara alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmainah (2013) pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2012 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Hipotesis 2** yang berbunyi: Alokasi belanja modal dan Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 4. Coefficients Regresi Alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	67.182	2.337		28.749	.000
	Alokasi belanja modal	-.032	.109	-.053	-.294	.771
	Pertumbuha n ekonomi	.370	.137	.487	2.695	.011

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2018*

Berdasarkan gambar 4 di atas, dapat diketahui koefisien dari hasil analisis regresi untuk variabel alokasi belanja modal sebesar -0,032 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,370 dengan konstanta sebesar 67,182 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 67,182 - 0,032X_1 + 0,37X_2$$

Hasil uji empiris pengaruh alokasi belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai p value (Sig) sebesar 0,771 yaitu di atas alpha 5%, yang artinya alokasi belanja modal tidak berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai p value (Sig) sebesar 0,011 yaitu di bawah alpha 5%, yang artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Umiyati (2014) pada 9 kabupaten/kota di Jambi tahun 2009-2013 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

**Hipotesis 3** yang berbunyi: Alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi

Gambar 5. Anova Alokasi Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.994	2	61.997	4.460	.019 <sup>a</sup>
	Residual	458.680	33	13.899		
	Total	582.674	35			

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal

b. Dependent Variable: indeks pembangunan manusia

*Sumber data: output SPSS yang diolah, 2018*

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan nilai p value (Sig) sebesar 0,019 yaitu di atas alpha 5%, yang artinya alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ariza (2013) pada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2008-2012 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hair, dkk (1998) menyatakan bahwa melalui analisis jalur akan ditemukan pengaruh langsung dan tidak langsung. Besarnya pengaruh langsung adalah “koefisien p”, sedangkan pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian antara “koefisien p” yang satu dengan “koefisien p lainnya” dalam satu arah. Disisi lain Hasan (1990) menjelaskan bahwa sumbangan efektif per variable adalah kuadrat dari pengaruh total (penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung). Merujuk pernyataan para ahli tersebut, besarnya sumbangan efektif variabel eksogen terhadap variabel endogenya adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Sumbangan efektif

	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh total	Sumb Efektif
Alokasi Belanja Modal → Pertumbuhan ekonomi	0,518	-	0,518	51,80%
Alokasi Belanja Modal → Indeks Pembangunan Manusia	-0,053	0,487	-0,026	2,58%
Pertumbuhan Ekonomi → Indeks Pembangunan Manusia	0,487	-	0,487	48,70%

Sumber: Data Yang Diolah

Dari tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau secara langsung memberikan sumbangan terhadap indeks pembangunan manusia daerah itu sebesar 48,70%. Disisi lain tinggi/rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut ditentukan oleh alokasi belanja modal sebesar 51,80%. Sedangkan alokasi belanja modal mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara tidak langsung (yaitu melalui pertumbuhan ekonomi) sebesar 2,58%.

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh langsung dan tidak langsung alokasi belanja modal pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2014-2016. Berikut ini hasil penelitiannya: (1) Alokasi belanja modal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Semakin tinggi alokasi belanja modal di kabupaten/kota se-Provinsi Riau, maka semakin tinggi pula pertumbuhannya atau sebaliknya, (2) Alokasi belanja modal tidak memiliki pengaruh langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia, dan (3) Alokasi belanja modal secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariza, Anggati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Perspektif Islam.
- BPS Provinsi Riau. 2018. Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2010-2016. (<https://riau.bps.go.id/dynamic/ptable/2017/07/05/36/distribusi-pdrb-kabupaten-kota-di-provinsi-riau-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-persen-2010-2016.html>. Download: 9 Feb 2018)
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

- dan Kualitas Pembangunan Manusia. Dalam The 3<sup>rd</sup> National Conference UKWMS 2009.
- Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (<http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangan-daerah/setelah-ta-2006>)
- Nurmainah, Santi. 2013. Analisa Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Diponegoro. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2013, hal. 131-141
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Pertama Permendagri No 13 Tahun 2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Kedua Permendagri No 13 Tahun 2006).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011.
- Sarwono, Jonathan. 2012. *Path Analysis*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Umiyati, Etik, Amril, Zulfanetti. 2014. Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Universitas Jambi. *Jurnal Sains Sosiohumaniora*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.